

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Adjie, Habib. *Menjadi Notaris Profesional yang Bermartabat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

_____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2013.

_____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Dessler, Gary. *Human Resource Management*, 15th edition. Boston: Pearson, 2017.

Dhoni Martien, H. *Politik Hukum Kenotariatan*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

Fuady, Munir. *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Jakarta: Mandar Maju, 1995.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. IV. Jakarta: Erlangga, 1999.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Salim HS. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

_____. *Pengaturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Safa'at, M. Ali dan Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Soemitro, Sri Haningsih. *Profesi Notaris dan Kode Etik Profesi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komennya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2017.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.

Sulihandari, Hastanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

B. JURNAL

Adinugraha, Alvin Oktafiano. "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan yang Menggugurkan Hak Ingkar." *Privat Law*, Vol. 1, No. 7 (2015): 115–126.

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris." *Perspektif*, Vol. 17 No. 3 (September 2012): 173–183.

Christian, A. "Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 90.

Difah, Zumroh Pembajeng Fara, Fifiana Wisnaeni, dan Novira Maharani Sukma. "Tanggungjawab Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris." *Notarius*, Vol. 14, No. 2 (2021): 795.

Kusumaningdiah, Evi. "Tanggung Jawab Notaris atas Adanya Keterangan Palsu dalam Akta yang Dibuatnya." *Notarius*, Vol. 14 No. 2 (2017): 15.

Lucia, Maria S. "Legal Certainty in Notarial Deeds: A Comparative Study of Notary Regulations in Indonesia and the Netherlands." *International Journal of Law and Legal Studies*, Vol. 5, No. 1 (2021): 34.

Prakoso, Wibby Yuda & Gunarto. "Tanggung Jawab dan Akibat Hukum dari Akta Notariil yang Dibuat oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai." *Jurnal Akta*, Vol. 9, No. 3 (2022): 647.

Sari, Erwina Junita. "Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris." *Officium Notarium*, Vol. 2 No. 1, April 2022: 71.

Sesung, R. Rusdianto, Fayakundia Putra Sufi, Roosalina Kartini, Jeffry Tanugraha. "Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3, 2023.

Yansyah, Dedi. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik yang Pernah Dibuatnya*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris.
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Tata Kerja Majelis Kehormatan Notaris.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi dan Pengangkatan Notaris.
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Perpindahan, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

- l. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi dan Pengangkatan Notaris.
- m. Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 No. 44.
- n. Kode Etik Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia Tahun 2002.
- o. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (KEINI), Keputusan KLB INI Tahun 2015.

D. Sumber Internet

Mahkamah Konstitusi RI. “Putusan MK No. 49/PUU-X/2012.” Diakses 10 Juli 2025. <https://www.mkri.id>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Layanan Kenotariatan.” Di akses 10 Juli 2025.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). “About KNB Tasks.” <https://www.knb.nl/english/about-knb/tasks>, diakses 27 Juli 2025.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). “The Notary.” <https://www.knb.nl/english/the-notary>, diakses 27 Juli 2025.

Ikatan Notaris Indonesia (INI). “Kode Etik Notaris.” Diakses 10 Juli 2025. <https://www.ini.id>.

Wikipedia. “Notaris.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses 1 Juni 2025.

